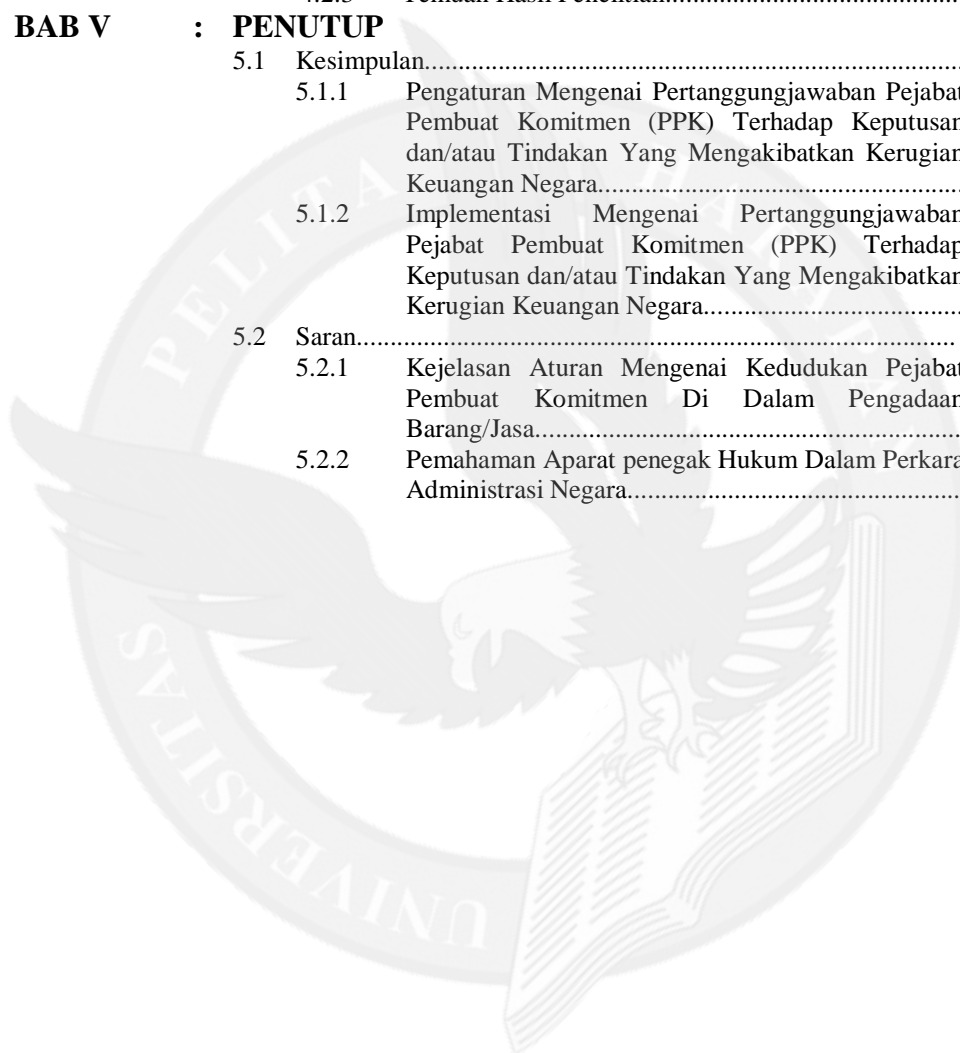


DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang Masalah.....	1
1.2	Rumusan Masalah.....	13
1.3	Tujuan Penelitian.....	14
1.4	Manfaat Penelitian.....	15
1.5	Sistematika Penelitian.....	16
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
2.1	Landasan Teori.....	18
2.1.1	Teori Keadilan Bermartabat.....	18
2.1.2	Teori Perlindungan Hukum.....	20
2.2	Landasan Konseptual.....	22
2.2.1	<i>Good Governance</i>	22
2.2.2	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	23
2.2.3	Pejabat Pembuat Komitmen.....	25
2.2.4	Pelimpahan Kewenangan.....	25
2.2.5	Atribusi.....	28
2.2.6	Delegasi.....	30
2.2.7	Mandat.....	32
2.2.8	Diskresi atau <i>Freies Ermessen</i>	33
2.2.9	Korupsi.....	36
2.2.10	Keuangan Negara.....	37
BAB III	: METODOLOGI PENELITIAN	
3.1	Bentuk dan Pendekatan Penelitian.....	40
3.2	Bahan Hukum.....	48
3.3	Teknik Pengumpulan/Cara Perolehan Data.....	50
3.4	Jenis Data.....	52
3.5	Pengolahan Dan Analisis Data.....	52
BAB IV	: PEMBAHASAN DAN ANALISA	
4.1	Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.....	57
4.1.1	Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	57
4.1.2	Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	66
4.1.3	Kewenangan dan Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).....	86
4.1.4	Kewenangan Diskresi dan Dampak Atas Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).....	101
4.2	Implementasi Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.....	104
4.2.1	Evaluasi Implementasi Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.....	104
4.2.1.1	Unsur Idiil.....	104

	4.2.1.2	Unsur Operasional.....	106
	4.2.1.3	Unsur Aktual.....	110
	4.2.2	Kajian/Studi Kasus.....	112
	4.2.2.1	Kronologi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2014/PTUN-JKT.....	112
	4.2.2.2	Landasan Pengaturan.....	136
	4.2.2.3	Penanganan Oleh Lembaga Peradilan....	141
	4.2.2.4	Analisa Kasus Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2014/PTUN-JKT.....	151
	4.2.3	Temuan Hasil Penelitian.....	154
BAB V	:	PENUTUP	
	5.1	Kesimpulan.....	161
	5.1.1	Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.....	161
	5.1.2	Implementasi Mengenai Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.....	162
	5.2	Saran.....	163
	5.2.1	Kejelasan Aturan Mengenai Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen Di Dalam Pengadaan Barang/Jasa.....	163
	5.2.2	Pemahaman Aparat penegak Hukum Dalam Perkara Administrasi Negara.....	164



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
1		
2		
3		



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
1	Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara	10
2	Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara	10
3	Latar Belakang Pelaku Korupsi Pengadaan Barang/Jasa	11

